

**KEKUASAAN YANG TERPUSAT PADA SEKELOMPOK KECIL
ELIT DAN MUNCULNYA KEBENCIAN SOSIAL BUDAYA
TERSELUBUNG PADA MASYARAKAT INDONESIA PASCA
REFORMASI**

Dasim Budimansyah

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia

budimansyah@upi.edu

Abstrak

Artikel ini membahas saling keterkaitan antara merebaknya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok kecil elit (oligarchy) dan munculnya kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity pada masyarakat Indonesia pasca reformasi. Argumentasinya adalah bahwa persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif yang lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu Indonesia perlu menyiptakan civic culture sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok masyarakat dan salah satu mediana yang paling potensial adalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata kunci: *oligarchy, socio-cultural animosity, civic culture.*

PENDAHULUAN

Setelah lengsernya rezim Orde Baru dimana praktik indoktrinasi sudah tidak terdengar lagi, mestinya kehidupan bernegara-bangsa Indonesia semakin demokratis mengingat pada era ini wacana kewarganegaraan meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral. Implikasinya perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia, keadilan sosial dan politik mestinya akan lebih mudah dicapai. Akan tetapi kenyataannya sangat berbeda karena harapan tersebut tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berekspresi (Kalidjernih, 2008). Pada sisi yang lain, bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan. *Pertama*, berubahnya perangai masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-

basi sekonyong-konyong menjadi pemaarah, suka mencaci, pendendam, menganiaya sesama manusia di keramaian kota, pertikaian antarkampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang luar biasa, pembegalan, kekerasan seksual, dan beragam tindak pidana lainnya.

Kedua, dalam tiga dekade terakhir ini Indonesia tengah mengalami proses kehilangan baik pada aspek fisik, hayati, maupun budaya. Pada aspek fisik kita kehilangan tanah subur akibat semakin luasnya tanah kritis; pada aspek hayati kita kehilangan hutan tropis akibat pembalakan liar; sedangkan pada aspek budaya kita juga tampaknya kehilangan niat untuk menaati hukum, bahkan untuk menaati aturan yang paling sederhana, misalnya aturan berlalu-lintas (Budimansyah, Firiarsari, dan Iswandi, 2015). Dalam aspek budaya sebagian dari kita sudah kehilangan kejujuran dan rasa malu yang ditandai oleh kenyataan bahwa sudah sekian lamanya Indonesia mendapat predikat sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia akan tetapi hingga saat ini korupsi masih tetap marak pada berbagai lini kehidupan. Di lain pihak kita juga telah kehilangan rasa ke-Indonesiaan karena yang tampak justru gejala yang semakin menonjolkan kepentingan daerah dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Muaranya adalah suatu keadaan dimana kita kehilangan cita-cita bersama (*in-group feeling*) sebagai suatu bangsa. Jika demikian kekhawatiran yang paling mendalam adalah suatu keadaan dimana sudah tidak ada lagi “*Indonesian Dream*” yang mengikat kita bersama, yang lebih menonjol adalah cita-cita golongan untuk mengalahkan golongan lain (Raka, 2008).

Jika demikian mungkinkah proses kehilangan itu terus berlangsung? Mengingat kehilangan tersebut telah terjadi pada banyak hal maka tidaklah mustahil hal tersebut akan terus berlangsung. Jika demikian halnya maka daftar kehilangan tentu akan semakin panjang. Persoalannya adalah apakah hal ini merupakan tanda-tanda kita akan meluncur ke arah kehilangan segala-galanya sebagaimana disindir oleh kata-kata bijak berikut: *You lose your wealth, you lose nothing; You lose your health, you lose something; You lose your character, you lose everything*. Tentu saja kita tidak berharap munculnya kejadian seperti itu. Kita tidak menginginkan kehilangan karakter sebagai suatu bangsa, karena jika demikian akan mengakibatkan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu kita

perlu mencermati dengan sungguh-sungguh perihal faktor apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya berbagai gejala pada masyarakat kita pasca reformasi tersebut.

Gejala Sosiologis Fundamental

Gejolak masyarakat Indonesia yang terjadi pasca reformasi sebagaimana telah diungkapkan pada uraian di atas dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Jika memahami situasi pasca reformasi 1998 terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejala masyarakat Indonesia pasca reformasi.

Pertama, setelah tumbangny struktur kekuasaan “otokrasi” Pemerintahan Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki yang ditandai oleh adanya kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya). Benih-benih oligarki sebenarnya telah tumbuh dan dibesarkan oleh rezim Orde Baru, namun kemudian berubah secara dramatis seiring tumbangny kekuasaan Presiden Soeharto (Winters, 2013; Robinson & Hadiz, 2004). Beberapa fakta ihwal berlangsungny praktik oligarki adalah sebagai berikut: (a) Kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui Pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen. Melalui Parlemen kelompok ini berhak mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat; (b) Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas; (c) Kekuasaan hukum formal dikuasai oleh para praktisi dan penegak hukum yang dengan kepiawaianny dan/atau wewenangny bisa mengatur siapa salah siapa benar; (d) Sebagian besar uang di negeri ini berada di tangan sekelompok kecil orang yang justru sedang terpojok secara politis. Kelompok ini bisa membeli “kebenaran” melalui lembaga hukum, demo, pembentukan opini

publik melalui media massa, bahkan kursi di parlemen. Perhatikan misalnya kasus-kasus suap di DPR yang melibatkan sejumlah anggotanya, sebagian besar karena terjerat oleh permainan para “pembeli kebenaran” melalui upaya rekayasa kebijakan dan regulasi-regulasi tertentu untuk meloloskan hasrat hewannya; (e) Sekelompok kecil elit daerah memiliki wewenang formal maupun informal untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri. Kelompok inilah yang sering menyuarakan isu *separatisme*, *federalisme*, otonomi luas, bahkan isu putra daerah; (f) Kelompok aktivis vokal (*vocal minority*) yang sering melakukan aksi-aksi demo dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak dengan cara-cara yang sering kali justru memuakkan rakyat kebanyakan (main hakim sendiri, melakukan tindak kekerasan, *sweeping*, membenturkan massa dengan aparat keamanan dan sebagainya) (Wirutomo, 2001).

Berkaca pada praktik oligarki seperti diungkapkan di atas, maka semua arah moral bangsa praktis dikuasai oleh kelompok kecil yang cenderung bersifat partisan dan primordial. Politik beroperasi dalam pengertian Machiavellian, sehingga akumulasi sumber daya kekuasaan individu, seperti kekayaan, jabatan, dan status, diraih melalui keputusan strategis yang cerdas, termasuk keputusan yang dibuat ketika membangun persekutuan politik dan ekonomi atau merengkuh dan merebut suara pemilih dalam pemilu (Liddle, 2013). Di lain pihak dampak desentralisasi pada sejumlah bidang amat mengecewakan banyak pihak: korupsi dan politik uang tetap merajalela, reformasi di daerah berjalan di tempat, pemerintah kabupaten tetap mandul, dan berlimpah penyakit lainnya. Semua patologi tersebut lahir akibat dasar kepentingan kelompok "predator" di tingkat lokal tidak dilumpuhkan seiring runtuhnya Orde Baru (Hadiz, 2010). Justru sebaliknya perubahan rezim di Jakarta menghasilkan tekanan baru bagi elite lokal untuk memanfaatkan sebanyak mungkin kekuasaan yang didelegasikan kepada mereka demi melindungi kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri (Robinson & Hadiz, 2013). Akibatnya, desentralisasi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dijanjikan oleh sebagian besar pendukungnya, beberapa di antaranya bahkan membeberkan sejumlah kasus empiris yang bisa diterangkan oleh analisis teoretis berbasis oligarki (Aspinal & Mietzner, 2010).

Kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat Indonesia pasca reformasi adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*). Gejala ini muncul dan semakin marak pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika Presiden Soeharto berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, antarkelas sosial, antarkampung, dan sebagainya. Dengan demikian konflik yang terjadi bukan konflik vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih mengarah pada konflik yang bersifat horisontal, antarsesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif yang bersifat fungsional, tetapi destruktif yakni konflik yang disfungsional. Dalam keadaan seperti ini dikhawatirkan Indonesia akan terperosok menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*).

Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia pasca reformasi adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (*manifest conflict*) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (*latent conflict*) antara berbagai golongan. Konflik yang bersifat tersembunyi inilah yang melahirkan kebencian sosial budaya terselubung, yakni suatu kebencian yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme **sosialisasi kebencian** yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosialisasi di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya (Budimansyah, 2011).

Kebencian sosial budaya terselubung ini berhubungan dengan pluralitas masyarakat. Peristiwa hancurnya Yugoslavia akibat semakin menipisnya *in-group feeling* di antara etnis yang ada, sementara katup penyelamat (*safety valve institution*) untuk mengurai kebencian sosial budaya terselubung tidak bekerja efektif. Namun hal ini bukan faktor penentu, karena banyak masyarakat plural yang lain bisa membangun *platform* budaya yang mampu menghasilkan kerukunan antaretnis pada derajat yang cukup mantap. Malaysia misalnya, dengan

konsep pembangunan sosial budayanya telah berhasil menciptakan *civic culture* sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok rasial dan agama. Konflik politik sekeras apapun yang terjadi di Malaysia, tidak pernah mengusik kesepakatan ini (Wirutomo,2001). Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia bahwa setiap perbedaan pandangan politik selalu ditarik lagi kepada faktor perbedaan budaya yang paling mendasar (terutama agama). Inilah yang membuat persoalan politik tidak pernah mudah diselesaikan. Pertanyaannya adalah mengapa hal demikian itu terjadi? Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (integrasi normatif) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (integrasi koersif). Atas dasar kenyataan demikian maka cita-cita reformasi untuk membangun masyarakat Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang memiliki karakter ke-Indonesiaan yang adaptif di era global.

Membangun Karakter Ke-Indonesiaan

Peradaban modern yang lahir dari ibu kandung globalisasi ternyata tidak semulus yang kita bayangkan, di sana sini muncul sejumlah persoalan dan kekecewaan. Perkembangan Eropa sebagai kiblat peradaban modern bermula dari timbulnya kebebasan (*freedom*), yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level individu kebebasan itu diawali timbulnya *self* (diri) dalam proses *individuation*, ialah lepasnya tali-tali individu sejak terputusnya “tali ari-ari” sampai mulai timbulnya rasa keterpisahan antara bayi dan ibunya, dan pada umumnya pemisahan ‘aku’ dengan ‘engkau’. Ketidakterpisahan antara individu dan lingkungannya (atau adanya tali-tali tadi), memberikan kepada individu perasaan aman (*security feeling*), perasaan kebersatuan (*belongingness*) dan perasaan bahwa ia mengakar (*rooted*) pada sesuatu. Diperolehnya kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ketiga tali-tali itu yang berganti dengan kekhawatiran (*anxiety*), ketidakberdayaan (*powerless*), kemenyendirian (*aloneless*), keterombang-ambing (*uprootedness*), keraguan (*doubt*) yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (*hostility*). Siklus individuasi itu

terjadi pada setiap individu, pada setiap saat, dan di setiap tempat. Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses *individuation* sepanjang sejarah, yang dalam masyarakat Barat merupakan hasil perjuangan, yang dapat disebut hasil perjuangan kebebasan. Seperti pada level individu, kebebasan ini juga berupa putusnya tali-tali terhadap segala macam kekuasaan: gereja, negara, dan eksploitasi ekonomi. Sebagaimana pada level individu, kebebasan atau putusnya tali-tali itu disertai pula dengan kegelisahan (*anxiety*), kehilangan kekuatan (*powerless*), kemenyendirian (*aloneless*), tidak mengakar (*uprootedness*), keragu-raguan (*doubt*), dan permusuhan (*hostility*) (Fromm, 1997).

Melalui proses kebebasan itu, Fromm melukiskan timbulnya sistem kapitalisme, yang terjadi pada abad ke-15, yakni abad pertengahan atau abad kegelapan dan abad ke-16, yakni abad Reformasi Gereja atau timbulnya Protestanisme. Kapitalisme pada abad ke-15 mula-mula berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa, dan dekatnya ke Dunia Timur, termasuk Arab/Islam, sehingga kebudayaan Timur dapat diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik yang kuat (persaudaraan) dan sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital berjalan sangat lambat. Walaupun demikian dalam sistem perdagangan tersebut kapital telah berkedudukan sebagai majikan.

Sejak abad ke-16, yakni tatkala Reformasi Gereja, kelas menengah menjadi mencuat ke atas sebagai akibat lecutan **Luther** dan **Calvin**, mereka mendambakan harta kekayaan sebagai simbol keberhasilan. Ajaran mereka yang terpenting adalah kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah kebebasan. Namun segi negatifnya, sebagaimana diungkapkan di muka adalah terjadinya perasaan tidak aman (*insecurity feeling*), kegelisahan (*anxiety*), kehilangan kekuatan (*powerless*), dan sebagainya.

Fromm menyimpulkan bahwa disamping orang membutuhkan kebebasan (*freedom*), ia juga memerlukan ketergantungan (dependensi atau *submissiveness*). Akibat kebutuhan *submissiveness* itu tidak terpenuhi, maka kebebasan menjadi

tidak bermakna lagi. Maka timbulah mekanisme untuk melarikan diri dari kebebasan atau *escape from freedom* berupa melukai diri sendiri (*masochism*), melukai orang lain (*sadism*), melenyapkan objek atau saingan (*destructiveness*), dan mengekor secara serempak (*automaton*) (Budimansyah, 2004). Demikianlah kapitalisme Barat dan masyarakat modern sebagaimana diterangkan Fromm. Mereka memiliki karsa (*will*) yang kuat (seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah. Kegagalan itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin (*insecurity feeling*) akibat melupakan nilai-nilai agama.

Kekecewaan akan peradaban modern telah menghasilkan suatu impian untuk menyiptakan suatu masyarakat baru dengan moralitas baru (lihat misalnya Giddens dalam “*The Third Way*” 1998, Etzioni dalam “*The Spirit of Community*” 1993, Robert Bellah dalam “*The Good Society*” 1999). Namun demikian, sampai akhir abad ke-20, sekalipun telah lahir berbagai organisasi warganegara yang sukarela dan mandiri (seperti LSM, organisasi massa, dan organisasi politik), peradaban manusia di dunia masih diwarnai berbagai kekejaman terhadap manusia dan lingkungannya. Ternyata kunci dari kesejahteraan manusia bukan semata-mata terletak pada terciptanya hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, tetapi yang lebih mendasar adalah moralitas baru (baca: karakter baru) perlu dihembuskan kedalam sistem modern tersebut.

Suatu tuntutan moralitas baru misalnya telah diteriakkan oleh Revolusi Prancis: “*liberte, egalite, fraternite*” (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), tetapi sampai saat ini tampaknya hanya “kebebasan” yang diperoleh, sedangkan “persamaan” masih jauh tertinggal. Ini terutama disebabkan karena moral “persaudaraan” hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Rupa-rupanya hal yang sama terjadi dalam reformasi kita. Semua golongan mabuk kebebasan, sementara semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya persamaan dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Mengingat akan hal itu penulis berpendapat bahwa inti dari karakter ke-Indonesiaan yang masih harus kita bangun dalam masyarakat kita adalah “persaudaraan” sebagai sikap moral baru.

Tokoh lain Robert Bellah (1999), seorang sosiolog Amerika Serikat juga menekankan pentingnya kebangkitan moral baru yang mampu melandasi pranata sosial dan menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik antara masyarakat dan negara maupun antarwarganegara sendiri. Ia mengatakan bahwa semua kejadian yang telah merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihan-pilihan kita (*social choices*) yang kemudian kita bakukan dalam pranata sosial. Untuk merombaknya perlu dilakukan sesuatu pemilihan-pemilihan yang baru, ini membutuhkan suatu sistem nilai, karena semua pilihan memiliki landasan moral dan etika.

Menganalisis pranata-pranata sosial berarti mempertanyakan: “bagaimana kita seharusnya hidup?” dan “bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita hidup?”. Pranata-pranata sosial yang telah mengatur bagaimana kita hidup ternyata berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan (*ideal values*). Jadi *ideal values* hanya tersimpan dalam khasanah budaya kita, tapi tidak secara efektif mengatur perilaku kita di dalam pranata sosial yang ada (Wirutomo,2001).

Kekecewaan terhadap peradaban modern juga diungkapkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat lainnya yang bernama Amitai Etzioni (1993) dengan memberi contoh masyarakat negaranya sendiri, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat, menurut Etzioni, perlu mengembangkan nilai keakuannya (*individualisme*) yang telah berakar pada budaya mereka dengan nilai-nilai ke-kitaan yang bersifat komunitarian. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak (yang berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak). Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat kita yang sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru selalu dilecehkan hak-haknya oleh pemerintah dan negara, dalam masa reformasi ini sekonyong-konyong mengidap gejala “*strong sense of entitlement*” yaitu cenderung menuntut hak (bila perlu secara paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum.

Etzioni menyadari terbentuknya masyarakat komunitarian hanya dapat terwujud melalui suatu gerakan sosial yang sistematis. Itulah sebabnya ia bersama

kelompoknya mencanangkan kebulatan tekad gerakan “komunitarian” sebagai berikut:

1. Kita harus mampu menciptakan suatu moralitas baru yang tidak mengganggu kehidupan pribadi orang (sikap anti *puritanisme*).
2. Kita harus mempertahankan suatu “hukum dan keteraturan” tanpa harus jatuh pada suatu “negara polisi” dengan merancang secara hati-hati kewenangan dan kekuasaan pemerintah.
3. Kita harus menyelamatkan kehidupan keluarga tanpa harus membatasi hak anggotanya secara diskriminatif (misalnya memaksakan peran domestik kepada perempuan).
4. Sekolah harus mampu memberikan pendidikan moral, tanpa mengindoktrinasi anak muda.
5. Kita harus memperkuat kehidupan komunitas tanpa menjadi orang fanatik dan saling bermusuhan terhadap komunitas lain.
6. Kita harus meningkatkan tanggung jawab sosial bukan sebagai suatu pembatasan hak-hak kita, tetapi justru sebagai perimbangan dari hak-hak yang kita peroleh. Semakin besar hak yang diterima, semakin besar pula kewajiban yang perlu ditanggung.
7. Perjuangan kepentingan pribadi harus diimbangi dengan komitmen pada komunitas, tanpa harus menjadi tumbal bagi kelompok. Oleh karena itu kerakusan individu yang tanpa batas harus diganti dengan “kepentingan pribadi” yang bermanfaat secara sosial dan memperoleh peluang yang disahkan oleh masyarakat.
8. Kewibawaan pemerintah harus dijaga tanpa menghilangkan kesempatan bagi semua warga menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Semua itu adalah inti dari sikap moral komunitarian yang ditawarkan oleh Etzioni, yakni kesepakatan manusia modern untuk menciptakan moral baru, kehidupan sosial, dan keteraturan publik berdasarkan pada penguatan kembali nilai “kebersamaan”, tanpa adanya *puritanisme* dan penindasan. Semangat mengembangkan moral baru bagi peradaban modern yang telah mengalami kegagalan ini juga tampak dari pemikiran Giddens dalam “*The Third Way*”

dimana ia memperjuangkan demokrasi sosial yang berintikan solidaritas, kesamaan dan keamanan serta peran aktif negara (Wirutomo,2001).

Konsep karakter ke-Indonesiaan yang penulis maksudkan dalam tulisan ini pada dasarnya mengacu pada sikap moral komunitarian yang bercorak kepribadian Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun karakter ke-Indonesiaan dengan demikian merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antarwarganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warganegara dan nasib seluruh bangsa.

Mereposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Bagian akhir tulisan ini mari kita memfokuskan perhatian pada keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di persekolahan dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warga masyarakat yang dewasa. Anak adalah seorang warga negara hipotetik, yakni seorang warga negara muda yang “belum jadi” karena masih harus dididik menjadi warga dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Budimansyah,2008). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warga yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara-bangsa. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganya untuk menyokong kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, menjaga keutuhan negara-bangsa, diliputi semangat musyawarah mufakat, dan keadilan bagi semua.

Oleh karena itu, pembelajaran PKn seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang

berakhlak mulia, efektif dan terdidik. Negara-bangsa dipelihara oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental dalam bermasyarakat dan bernegara-bangsa maka masyarakat yang berkeadaban, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat sipil lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya pendidikan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan sebagai wahana mendidik anak menjadi warga masyarakat yang dewasa.

SIMPULAN

Untuk dapat membina anak menjadi warga negara yang baik perlu langkah-langkah strategis sebagai berikut. *Pertama*, merevitalisasi PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Proses pembinaan ini melibatkan aspek psikopedagogis. Oleh karena itu penulis namakan pendekatan *psycho-paedagogical development*.

Kedua, PKn perlu diposisikan sebagai gerakan sosial-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri anak dan pemuda baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai proyek belajar di luar kelas. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran PKn hendaknya berbasis kehidupan masyarakat, karena secara alamiah anak tumbuh bersamaan dengan perkembangan identitasnya sebagai anggota masyarakat. Proses pembinaan anak dan pemuda yang melibatkan pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma ini penulis namakan pendekatan *socio-cultural development*.

Ketiga, PKn perlu diposisikan sebagai program pendidikan umum (*General Education*) bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk

pembinaan pengetahuan, kecakapan, dan kebajikan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk mengembangkan pemimpin yang paripurna. Proses pembinaan para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik melalui pendidikan umum ini penulis namakan pendekatan *socio-political intervention*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspinal, E. & Mietzner, M. editor. (2010) *Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.
- Bellah, R. et.al. (1999). *The Good Society*, New York: Vintage Books.
- Budimansyah, D., Fitriyani, S., Iswandi, D. (2015) *Model AIDA Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Berlalu lintas di Jalan Raya*, Laporan Penelitian Hibah Kemristekdikti.
- Budimansyah, D. (2012) *Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter*, Bandung: Penerbit Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2011) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pembangunan Karakter Bangsa*, Bandung: Penerbit Widya Aksar Press.
- Budimansyah, D. (2008). "Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*)", *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1 No.2, hlm.179-198.
- Budimansyah, D. (2007). "Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang", *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1 No.1, hlm.11-26.
- Budimansyah, D. (2004). *Membangkitkan Karsa Umat*, Bandung: Penerbit Genesindo Pustaka Utama.
- Etzioni, A. (1993). *The Spirit of Community: The Reinvention of American Society*, New York: Simon and Schuster.
- Fromm, E. (1997). *Lari Dari Kebebasan*, penerjemah Khamdani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (1998). *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, London: Polity Press.

- Hadiz, V. R. (2010) *Localising Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Standford, CA: Standfoer University Press.
- Kalidjernih, F.K. (2008). "Cita Sipil Indonesia Pasca-Kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru", *Jurnal Acta Civicus*, Vol.1 No.2, hlm.127-146.
- Liddle, R.W. (2013) "Improving the Quality of Democracy in Indonesia, in Indonesia, in *Indonesia Journal, Special Edicion, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*", *Cornell Southeast Asia program Publications*, No.96, pp.59-80.
- Raka, I.I.D.G. (2008). *Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa: Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*, Bandung: Majelis Guru Besar ITB.
- Robinson, R. & Hadiz, V. R. (2013) "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganizing of Power in Indonesia, in *Indonesia Journal, Special Edicion, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*", *Cornell Southeast Asia program Publications*, No.96, pp.35-57.
- Winters, J.W. (2013) "Oligarchy and Democracy in Indonesia, in *Indonesia Journal, Special Edicion, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*", *Cornell Southeast Asia program Publications*, No.96,pp.11-34.
- Wirutomo, P. (2001). *Membangun Masyarakat Adab*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.